

PENGARUH STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, INTERNAL AUDIT, KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, SISTEM INFORMASI AKUNTANSI, TEKNOLOGI INFORMASI, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DI INSTANSI PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG

Helmi Prila Aldino ¹⁾, Annisa²⁾, Dewi Zulvia³⁾

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi KBP
helmiprillaaldino@akbpstie.ac.id
annisa@akbpstie.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effect of Government Accounting Standards, Internal Audit, the quality of human resources, Accounting Information Systems, Information Technology, internal control systems on the quality of financial reports in Padang city government agencies. The population in this study were all financial employees at Padang City Government agencies. Using convenience sampling technique was applied to determine the sample. The sample in this study were employees of the finance department at Padang city government agencies who met the criteria. The number of samples used was 142 respondents who were taken based on predetermined criteria. Data was collected by using a questionnaire measured by a Likert scale. The results showed that the accounting information system had a positive and significant effect on the quality of financial reports, which was indicated by a significant value of 0.00, while information technology had a positive and significant effect on the quality of financial reports, which was indicated by a significant value. of 0.01.

Keywords: Government Accounting Standards, Internal Audit, quality of human resources, Accounting Information Systems, Information Technology, internal control systems and Quality of Financial Reports in Padang City Government Agencies.

LATAR BELAKANG

Laporan keuangan berisi informasi tentang posisi keuangan dan hasil yang dicapai oleh anggaran selama tahun fiskal. Pemerintah Daerah diberi mandat dan wewenang untuk melakukan pengelolaan keuangan untuk daerah, sehingga harus bertanggung jawab atas semua mandat dan wewenang yang telah dilakukan, oleh standar pelaporan keuangan ditetapkan. Selain adanya standar akuntansi pemerintah sebagai acuan dalam menggunakan proses Perangkaan laporan keuangan haru dilakukan secara efisien dan juga akurat, tepat waktu dan tentunya data yang dihasilkan harus rill/akurat. Diperlukan suatu sistem yang dapat merangkul pencapaian tersebut, yaitu adanya dukungan teknologi informasi (Widarsono, 2017).

Operasional manajemen keuangan harus mendapatkan informasi yang lebih dalam mengenai laporan keuangan, sehingga dari publikasi laporan keuangan tersebut dapat berguna bagi pihak yang berkepentingan dan menjadi dasar pengambilan keputusan. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 1 tahun 2015, Laporan Keuangan merupakan presentasi prosedural dari posisi keuangan dalam kinerja keuangan suatu entitas. Laporan ini menyatakan bahwa sejarah entitas terukur memiliki nilai yang berharga. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Biasanya, laporan keuangan lengkap meliputi laporan keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan modal penuh, arus kas atau laporan register kas dan laporan lain yang merupakan bagian dari integritas laporan keuangan (Ernawati Fidyah Yuli, 2017).

Menurut Masiaga, (2019) Sistem informasi akuntansi merupakan pengaturan berbagai dokumen, alat komunikasi, eksekutif, dan berbagai laporan yang dirancang untuk mengubah data keuangan

dari perusahaan atau organisasi menjadi informasi keuangan yang lebih baik dan Sistem informasi Akuntansi terdiri dari 3 indikator yaitu indikator relevan, kegunaan, dan prosedur.

Transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan keuangan publik untuk mewujudkannya upaya kongkritnya untuk menyediakan laporan pertanggungjawaban finansial pemerintah, dapat terlihat konsisten, bisa diandalkan dan tersusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku lalu dapat diterima dengan terbuka dimana itu telah memenuhi. Mengenai Keuangan Negara, yang mengharuskan dalam isi dan bentuk laporan pertanggungjawaban atas penerapan APBN/APBD ditata beserta laporan yang dihasilkan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, hal tersebut telah diatur dalam Peraturan undang- undang Negara Indonesia Nomor 17 tahun 2010 (Aditya & Surjono, 2018).

Faktor lain untuk terjadinya masalah adalah keinginan dari manajer atau pemimpin bahwa motif untuk mengukur kinerja yang di laksanakan oleh banyak instansi pemerintah juga bukan untuk akuntabilitas publik tetapi sesuai dengan peraturan pemerintah pusat dan kepentingan parlemen. Diketahui di lapangan bahwa latar belakang pendidikan sumber daya manusia instansi pemerintah tidak seluruhnya dari pendidikan akuntansi dan juga Pengendalian internal sangat penting bagi suatu organisasi, termasuk pemerintah daerah dalam mengkoordinasikan dan mengawasi terjadinya kecurangan (Sofyani & Akbar, 2013).

Menurut Taman (2017) kualitas laporan keuangan dapat berbagi manfaat dalam mengambil kebijakan pemerintah di masa depan. Dalam sebuah organisasi manajemen apapun memerlukan informasi yang berbeda sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang.

Berdasarkan peraturan pemerintah, Nomor 71 tahun 2010, laporan keuangan adalah kondisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan yang teratur mengenai posisi laporan keuangan (PP Nomor 71, 2010) dan karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu ukuran normatif dalam menyadari informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Di sisi lain tujuan umum untuk memberikan informasi tentang laporan kondisi keuangan, realisasi anggaran, pada keseimbangan anggaran, dan keputusan tentang alokasi arus kas, saham dari entitas pelaporan bermanfaat bagi pengguna dalam menilai operasi dan perubahan sumber daya. Mutu dan kualitas dapat ditentukan oleh berbagai tingkat dan luasnya manfaat dan karakteristik kualitatif sesuatu. Sehingga karakteristik kualitatif harus puas dalam laporan keuangan yang dinilai sebagai kualitas laporan keuangan (Defitri, 2018).

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menurut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 32 ayat (2) yang menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintah disusun oleh salah satu komite standar akuntansi yang independen dan ditetapkan dengan PP setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). SAP merupakan landasan hukum bagi aparatur pemerintah pusat maupun daerah dalam mengelola penerimaan dan penggunaan dana secara transparan, efisien, dan dapat di pertanggung jawabkan sehingga tujuan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dapat tercapai (Rahmah & Zulkifli, 2018).

Menurut Trisnawati (2018) yang mengacu pada laporan keuangan juga dapat dikatakan relevan, jika informasi tersebut dalam laporan dapat mempengaruhi keputusan untuk pengguna. Dimana harus disajikan dalam waktu sehingga dapat berarti untuk penarikan kesimpulan serta informasi harus lengkap dan rinci terdapat dalam laporan keuangan. Menurut Eveline (2016) Pendapatan dan proses output merupakan salah satu faktor yang mendukung kualitas laporan keuangan yang disajikan. Sebagai dasar dari sistem pelaporan keuangan yang baik yang tiga aspek ini harus terpadu dan saling berhubungan. Suatu satuan atau sistem dari suatu organisasi yang memiliki tanggung jawab dalam penyelesaian informasi keuangan tidak lain untuk membantu manajemen dalam membuat keputusan.

Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas penyajian laporan keuangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo

Gorontalo. Efektifitas penerapan standar akuntansi pemerintahan memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan”. Hal ini menunjukkan bahwa, penerapan standar akuntansi pemerintahan yang efektif, akan semakin meningkatkan kualitas laporan keuangan (Sako & Lantowa, 2018).

Penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Dengan adanya penerapan standar akuntansi pemerintah dapat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di Kabupaten Buleleng. Penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Gianyar (Rahmawati, 2018). H1: Standar Akuntansi Pemerintah Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran audit internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, artinya bahwa aktif/tidaknya peran audit internal dalam melakukan pengawasan terhadap laporan keuangan tidak ada pengaruhnya terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitian tidak sesuai dengan hipotesis yang penulis kemukakan sebelum dilakukannya penelitian.(Lola, 2017).

Audit internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Banjar. Hal tersebut menunjukkan bahwa jika pelaksanaan audit internal ditingkatkan, maka kualitas pelaporan keuangan yang dihasilkan akan lebih maksimal (Suherman, 2018).

Peran Internal Audit berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Artinya, Peran Internal Audit berpengaruh memberikan perubahan yang berarti terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Hal yang paling berpengaruh dalam Peran Internal Audit yaitu objektivitas auditor (Purwati & Wasman, 2014). H2: Internal Audit Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Trisnawati (2018) Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah semakin baik apabila pengolahan SDM juga baik. Menurut Taman (2017) Kualitas sumber daya manusia ialah kemampuan karyawan untuk berurusan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam menyelesaikan tugas. Dalam menyelesaikan pekerjaan secara efisien dan efektif juga mendukung ketepatan waktu pelaporan keuangan membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten.

Menurut Eveline (2016) sumber daya manusia dengan keterampilan akuntansi yang baik dalam menguasai proses penyusunan laporan keuangan sampai publikasi. Artinya, SDM dapat mengontrol proses dan menjaga proses sesuai dengan aturan. Hal ini memungkinkan SDM untuk melakukan kontrol internal dalam persiapan, penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Tidak memiliki dampak positif terhadap kualitas laporan keuangan dari hasil yang dapat disimpulkan tersebut Artinya, mereka benar-benar dapat melatih sumber daya manusia yang kurang mampu dan mengawasi pelaksanaan laporan keuangan. Kualitas sumber daya manusia telah terbukti tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan, H3: Kualitas SDM Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Eveline, (2017) Sistem informasi akuntansi adalah sistem yang memproses data dan transaksi untuk menghasilkan informasi yang berguna untuk perencanaan, manajemen, dan bisnis. Untuk memungkinkan pembuat keputusan menghasilkan informasi yang mereka butuhkan, sistem informasi akuntansi mengumpulkan transaksi dan data lainnya, memasukkannya ke dalam sistem data, memproses dan menyimpan data untuk kebutuhan masa depan, Anda perlu membuat laporan dan informasi atau memungkinkan pengguna untuk melihat data yang tersimpan. Kontrol seluruh

proses sehingga informasi yang dihasilkan akurat dan efisien. Menurut (Gafur, 2016) Pemanfaatan system informasi akuntansi keuangan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan melalui internal audit, Karena system informasi akuntansi merupakan kemampuan system informasi untuk memberikan keyakinan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah benar atau valid, dan ketersediaan informasi bagi pembuat keputusan jika perlu sebelum informasi kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan.

Menurut Masiaga, (2019) sistem informasi akuntansi adalah komponen yang terkait dengan pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan dan penyebaran informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengawasan dalam suatu organisasi. Dalam Sistem informasi memerlukan aliran informasi. Hal ini disebabkan oleh keragaman kebutuhan informasi pengguna informasi. Sistem informasi juga mempengaruhi kinerja pemerintah daerah, yang terkait erat dengan sistem informasi akuntansi. Menurut Juwita, (2018), Sistem informasi akuntansi memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Memberikan bukti empiris bahwa sistem informasi akuntansi pemerintah yang baik meningkatkan kualitas laporan keuangan. Kita kemudian dapat menyimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi memiliki hubungan positif yang signifikan dengan kualitas laporan keuangan. H4: Sistem Informasi Akuntansi Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Puspita, (2017) Teknologi informasi mempunyai andil yang besar untuk mencapai laporan keuangan yang berkualitas. Teknologi informasi berfungsi sebagai pemrosesan, penyimpanan informasi, dan penyebaran informasi. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, menjelaskan bahwa untuk menindaklanjuti perencanaan pembangunan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang efektif, pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah ke layanan publik. Menurut (Wahyuni, Fadah, & Tobing, 2018) Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, artinya semakin dimanfaatkannya teknologi informasi maka laporan keuangan akan semakin berkualitas.

Menurut Rifandi, (2019) Teknologi informasi adalah aplikasi untuk menggunakan SIKD oleh pemerintah daerah untuk dapat menggunakan semua jenis informasi dan teknologi komputer untuk memberikan informasi dan layanan pemerintah kepada publik. Penggunaan teknologi informasi dalam akuntansi dapat memengaruhi kepuasan pengguna dengan laporan keuangan karena kualitas, keakuratan, dan keakuratan data dalam laporan keuangan yang ditentukan. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 menyatakan bahwa ada kewajiban bagi pemerintah dan pemerintah daerah untuk mengembangkan dan menggunakan kemajuan dalam teknologi informasi untuk mengelola keuangan lokal mereka dan meningkatkan kemampuan mereka untuk mengirim informasi keuangan lokal ke layanan publik. Dengan memanfaatkan kemajuan pesat dalam teknologi informasi, semua pemangku kepentingan akan memiliki kesempatan untuk mengakses, mengelola, dan menggunakan informasi yang terkandung dalam laporan keuangan pemerintah daerah secara stabil dan akurat. H5: Teknologi informasi Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Penelitian sebelumnya Eveline (2016) Pengolahan sesuai dengan kebutuhan dan situasi pengendalian internal yang baik menghidupkan semangat organisasi untuk melanjutkan upaya mempertahankan kualitas laporan keuangan. Pengendalian internal yang terintegrasi dari unit ke delegasi dapat membuat laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan harapan organisasi. Hal ini juga terbukti dari penelitian (Trisnawati, 2018) bahwa sistem pengendalian internal memiliki efek positif pada kualitas pelaporan keuangan.

Menurut Aditya & Surjono (2018) membuat laporan keuangan untuk pemerintah, harus melalui proses dan fase diatur oleh sistem akuntansi pemerintah. Secara transparan serta dapat dipertanggung jawaban yang dilakukan oleh manajemen keuangan. Hal ini dapat dilakukan jika pemerintah daerah dapat membangun, mengoperasikan dan memelihara sistem pengendalian internal yang sesuai.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan pengujian empiris mengenai variabel Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan, Internal Audit, Kualitas Sumber Daya Manusia Sistem Informasi Akuntansi Teknologi Informasi Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis dalam bentuk research question dimana dalam hal ini peneliti melakukan survey dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitiannya. Populasi untuk penelitian ini adalah 52 Instansi Pemerintah Kota Padang dengan sampelnya pegawai bagian keuangan di di instansi pemerintah kota Padang.

Jenis data cross section dengan sumber data primer. Skala pengukuran yang digunakan skala interval dan skala likert 1-5. Pengumpulan data penelitian menggunakan Kuesioner (angket). Menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden merupakan cara pengumpulan data.

Tabel 1
Defenisi Operasional Variabel

No	Variabel	Pengertian	Indikator
1.	Kualitas Laporan Keuangan (Y)	Kualitas Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP berbasis akrual dalam Permendagri No.64 tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah, dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan (pengguna), yaitu pengguna laporan keuangan pemerintah maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan(Nadir & Hasyim, 2018)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Relevan 2. Andal 3. Dapat dibandingkan 4. Dapat dipahami
2	Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (x1)	SAP merupakan landasan hukum bagi aparatur pemerintah pusat maupun daerah dalam mengelola penerimaan dan penggunaan dana secara transparan, efisien, dan dapat di pertanggung jawabkan sehingga tujuan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dapat tercapai (Rahmah & Zulkifli, 2018).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan PSAP Nomor 01 tentang penyajian laporan keuangan yaitu menerapkan basis akrual dan basis kas untuk mengakui transaksi/ peristiwa yang terjadi. 2. PSAP Nomor 02 tentang laporan realisasi anggaran yaitu menyusun dan menyajikan laporan realisasi anggaran menggunakan akuntansi berbasis akrual, dan mencatat pendapatan berdasarkan asas bruto. 3. PSAP Nomor 03 tentang laporan arus kas yaitu sesuai dengan SAP, dan menggunakan metode langsung dalam pelaporan arus kas dari aktivitas operasi. 4. PSAP Nomor 04 tentang catatan atas laporan keuangan yaitu menyajikan

informasi secara lengkap tentang penjelasan pos-pos dalam laporan keuangan setiap pelaporan.

5. PSAP Nomor 05 tentang akuntansi persediaan yaitu mengakui dan mencatat persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada akhir periode akuntansi.
6. PSAP Nomor 06 tentang akuntansi investasi yaitu mengakui kas yang telah dikeluarkan sebagai investasi setelah manfaat ekonomi potensi di masa yang akan datang dapat diperoleh investasi dapat diukur.
7. PSAP Nomor 07 tentang akuntansi aset tetap yaitu mencatat/ menilai aset tetap sebesar biaya perolehan dan mengklasikan aset tetap berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam operasi entitas.
8. PSAP Nomor 08 tentang akuntansi konstruksi dalam pengerjaan yaitu mengungkapkan informasi konstruksi dalam mengerjakan pada akhir periode akuntansi dan memindahkan konstruksi dalam pengerjaan ke aset tetap yang bersangkutan.
9. PSAP Nomor 09 tentang akuntansi kewajiban yaitu mencatat kewajiban sebesar nilai nominal dan mengakui kewajiban pada saat kewajiban timbul.
10. PASP Nomor 10 tentang koreksi kesalahan yaitu mengoreksi kesalahan melalui pembentukan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan berdasarkan SAP.
11. PSAP Nomor 11 tentang laporan keuangan konsolidasi yaitu mencakup laporan keuangan dari semua entitas akuntansi.

3	Internal Audit (x2)	<p>Audit internal merupakan jaringan mengevaluasi kontrol, dengan melakukan pendekatan sistematis dan disiplin untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko dapat membantu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Gafur et al., 2014).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagian Auditor Internal memiliki staf berkualitas dalam jumlah yang cukup. 2. Minimal staf AI merupakan lulusan D3 akuntansi atau lebih tinggi lagi. 3. Bagian AI memiliki uraian pesan dan fungsi yang jelas. 4. Peran dan tanggung jawab AI ditetapkan secara jelas dan beraturan. 5. Informasi yang disajikan oleh instansi bebas dari kesalahan yang bersifat material.
---	---------------------	---	--

6. Bagian AI memiliki sumber daya pendukung operasional yang cukup.
7. Pelatihan-pelatihan dilakukan untuk membantu penguasaan dan pengembangan keahlian dan tugas.
8. Dana-dana dianggarkan untuk memperoleh sumber daya dan peralatan pelatihan yang dibutuhkan.
9. Pelatihan mengenai pengetahuan kepatuhan syariah dalam audit laporan keuangan telah dijalani seluruh staf AI.
12. Seluruh Staf AI telah mengetahui tentang kepatuhan syariah dalam proses audit laporan keuangan.

4	Kualitas Sumber Daya Manusia	Kualitas sumber daya manusia menyangkut mutu dari tenaga kerja yang menangkut kemampuan fisik, kemampuan intelektual (pengetahuan), Maupun kemampuan Psikologis(mental) (Riawan, 2017)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan 2. Pelaksanaan 3. Pelatihan 4. Pengalaman
5	Sistem Informasi Akuntansi (X1)	Sistem Informasi merupakan sekumpulan komponen yang saling berhubungan mengumpulkan, memproses, menyimpan dan mendistribusikan informasi nuntuk menunjang pengambilan keputusan dan pengawasan dalam suatu organisasi(Masiaga, 2019)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Informasi Akuntansi dapat dimanfaatkan dan dikuasai pada teknologi Komputerisasi adalah kemampuan dasar bagi tim penyusun laporan. 2. Sistem Informasi Akuntansi berhubungan dengan teknologi 3. kesuksesan pelaksanaan system pelaporan keuangan dengan mempermudah dan mempercepat serta menciptakan keakuratan hasil, berupa laporan keuangan berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu. 4. Sistem Informasi Akuntansi memanfaatkan teknologi informasi membuka peluang untuk mengakses, mengelola, dan mendayagunakan informasi keuangan secara cepat dan akurat dalam melaksanakan tugas yang cukup.
6	Teknologi Informasi (X2)	Peran Teknologi Informasi (TI) tidak diragukan lagi penting dalam perdagangan dan bisnis ini arena hadir. Dengan teknologi informasi, bisnis sekarang dapat menyebarkan informasi dan berita di berbagai acara, untuk berinovasi segar produk/jasa, untuk memahami prospek bisnis, serta untuk menyusun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teknologi Informasi terdiri setiap subbagian yang cukup untuk melaksanakan tugas dengan menggunakan omputer. 2. Teknologi Informasi dapat dihubungkan jaringan internet yang dimanfaatkan dalam unit kerja untuk Mengirimkan data dan informasi yang dibutuhkan teknologi informasi.

		strategi bisnis yang kreatif dan fleksibel(Saeidi et al., 2018).	3. Teknologi Informasi dalam pembuatan laporan keuangan yang dilakukan secara komputerisasi dengan menggunakan software yang sesuai peraturan perundang-undangan.
			4. Teknologi Informasi dapat berupa laporan akuntansi dan manajerial yang dihasilkan dari system informasi yang terintegritas, teratur dan tepat waktu untuk jadwal pemeliharaan peralatan yang rusak didata.
7	Sistem Pengendalian Internal	Pengendalian intern adalah proses yang dilakukan atas amanat dari dewan direksi atau manajemen dalam suatu organisasi yang bertujuan untuk elindungi aset perusahaan, serta memastikan kepatuhan pada hukum dan peraturan yang berlaku (Zulvia, 2015)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lingkungan pengendalian 2. Penilaian resiko 3. Kegiatan pengendalian 4. Informasi dan komunikasi 5. Pemantauan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji *validitas* ialah uji yang digunakan untuk melihat seberapa jelas suatu pertanyaan dalam mengukur apa yang diukur. Suatu item dikatakan valid jika adanya korelasi yang signifikan dengan skor totalnya, hal ini menunjukkan adanya dukungan item tersebut dalam mengungkapkan suatu yang ingin di ungkap.

Untuk menentukan r tabel bisa menggunakan rumus $df = N-2$, $DF = 142-2$, $df = 140$. r tabel dengan $df = 140$ dengan tingkat signifikansi uji 2 arah sebesar 0.05 adalah sebesar 0.1648. Maka semua indikator instrumen Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah, Internal Audit, Kualitas Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi Akuntansi, Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Internal dinyatakan valid karena *corrected item-total* pada table 2 lebih besar dari r tabel.

Menurut Priyatno (2014) realibilitas kurang dari 0,6 adalah kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima dan diatas 0,8 adalah baik. Dilihat dari *cronbach's alpha* instrumen Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah, Internal Audit, Kualitas Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi Akuntansi, Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Internal besar dari 0.7 semua indikator instrumen dinyatakan baik atau sangat realibel.

Dari hasil pengolahan data diperoleh besarnya nilai test statistis adalah 0.071 dan signifikan pada 0.0780. Data residual berdistribusi normal jika Nilai signifikasi lebih besar dari 0, 05 maka H_0 diterima.

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat korelasi antar variabel independen. Jika koefisien regresi tidak dapat ditaksir dan nilai standard error menjadi tidak terhingga disebabkan pada model regresi terjadi multikolinearitas.

Dari data dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas antara variabel independen yang diindikasikan dari nilai *tolerance* setiap variabel independen lebih besar dari 0,1 dan nilai *VIF* lebih kecil dari 10.

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi residual memiliki *variance* yang konstan atau residual suatu observasi tidak saling berhubungan dengan residual observasi lainnya. Uji *heterokedastisitas* dilaksanakan dengan uji Glejser untuk mengetahui apakah data tersebar secara merata atau tidak, yang diinginkan tidak terjadi *heterokedastisitas*

$$Y = 16,284 + 0,358X1 + 0,157X2 + 0,194X3 + 0,627X4 + 0,280X5 + 0,421X2 + e$$

Dengan menggunakan T tabel pada signifikansi $0.05/2 = 0.025$ dengan derajat kebebasan $df = n - k - 1$ atau $142 - 2 - 1 = 139$. Hasil diperoleh untuk t tabel sebesar 1.97718. Nilai t hitung sebesar 4.929. Maka t hitung lebih besar dari t tabel ($4.929 > 1.9771$) dan signifikansi < 0.05 ($0.000 < 0.05$) maka H_0 ditolak, Maka **H1,2,3,4,5,6 diterima**.

Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Dari hasil pengujian secara parsial diketahui bahwa standar akuntansi pemerintah secara parsial berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Nilai t hitung sebesar 3.771 sedangkan t table sebesar 1.97718. maka t hitung lebih besar dari t tabel ($3.771 > 1.97718$) dan signifikansi < 0.05 ($0.000 < 0.05$) maka standar akuntansi pemerintah secara individual berpengaruh dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian ini sama dengan penelitian sebelumnya Menurut penelitian yang dilakukan menurut (Sako & Lantowa, 2018) mengatakan bahwa dengan menggunakan regresi sederhana bahwa penerapan SAP mempunyai pengaruh yang positif terhadap kualitas penyajian laporan keuangan. Ini terlihat dari koefisien regresi yang positif. Menurut (Suhaeti & Suhendar, 2015) bahwa Adanya pengaruh positif antara Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan, hal ini berarti terdapat peningkatan kualitas laporan keuangan di pemerintahan pusat dan daerah.

Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Dari hasil pengujian secara parsial diketahui internal audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Nilai t hitung sebesar 1.190 sedangkan t table sebesar 1.97718 maka t hitung lebih besar dari t tabel ($1.190 < 1.97718$) dan tingkat signifikansi < 0.05 ($0.236 > 0.05$) maka internal audit secara individual tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Lola, 2017) mengatakan bahwa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran audit internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, artinya bahwa aktif/tidaknya peran audit internal dalam melakukan pengawasan terhadap laporan keuangan tidak ada pengaruhnya terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan.

Pengujian secara parsial diketahui kualitas sumber daya manusia berpengaruh dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Nilai t hitung sebesar 2.312 sedangkan t table sebesar 1.97718 maka t hitung lebih besar dari t tabel ($2.312 > 1.97718$) dan tingkat signifikansi < 0.05 ($0.022 < 0.05$). Hasil pengujian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Taman, 2017), (Trisnawati, 2018), (Hartono, Arif, 2019), (Sukiati & Pertami, 2017) dan (Wahyuni, 2018).

Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Dari pengujian yang telah dilakukan maka diperoleh nilai T hitung untuk variable Sistem Informasi Akuntansi sebesar $= 4.367 > 1,977$ dengan signifikan $0,000 < 0,05$ nilai signifikan penggunaan sistem. Maka **H1 diterima**, berarti terdapat pengaruh yang positif antara Sistem Informasi Akuntansi (X1) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Instansi Pemerintah Kota Padang. Maka dapat disimpulkan bahwa Sistem Informasi Akuntansi adalah sistem yang memproses data dan transaksi untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi perencanaan, pengendalian, dan bisnis dalam arti menghasilkan laporan, informasi atau memungkinkan pemakai untuk melihat data yang tersimpan dan mengendalikan seluruh proses sedemikian rupa sehingga informasi yang dihasilkan akurat dan efisien. Penelitian ini sama dengan penelitian sebelumnya Menurut penelitian yang dilakukan menurut (Eveline, 2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Sistem Informasi Akuntansi signifikan pada kualitas laporan keuangan. Menurut (Gafur,

2016) hasil penelitiannya juga menyatakan bahwa system Informasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Untuk variabel Teknologi Informasi terdapat nilai T hitung sebesar $= 3.371 > 1,977$ t tabel sebesar, dengan tingkat signifikan $0,01 < 0,05$ nilai signifikan kepuasan pengguna sebesar $0,01 < 0,05$. Maka **H2 diterima**, berarti terdapat pengaruh yang positif antara Teknologi Informasi (X2) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Instansi Pemerintah Kota Padang. Maka dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kompleksnya institusi sektor publik. Penggunaan teknologi dalam hal ini untuk aplikasi informatika akuntansi di bidang pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk membantu pejabat manajemen keuangan menyiapkan laporan keuangan berbasis kelayakan secara efisien, efektif dan ekonomis berdasarkan standar akuntansi pemerintah. Menurut Puspita, (2017) Teknologi informasi mempunyai andil yang besar untuk mencapai laporan keuangan yang berkualitas. Teknologi informasi berfungsi sebagai pemrosesan, penyimpanan informasi, dan penyebaran informasi. Menurut Wahyuni et al., (2018) Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, artinya semakin dimanfaatkannya teknologi informasi maka laporan keuangan akan semakin berkualitas.

Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan.

Hasil pengujian secara parsial diketahui bahwa sistem pengendalian internal secara berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Nilai t hitung sebesar 4.929 sedangkan t table sebesar 1.9771. Maka t hitung lebih besar dari t tabel ($4.929 > 1.9771$) dan signifikansi < 0.05 ($0.000 < 0.05$). Hasil pengujian menunjukkan bahwa hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Nunung Suhaeti, Suhendar, 2015), (Eveline, 2016), (Trisnawati, 2018), (Ilat, Ventje, 2015), (Hartono, Arif, 2019) dan (Aditya & Surjono, 2018) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, hal ini berarti terdapat peningkatan kualitas pelaporan keuangan di instansi pemerintahan kota Padang. Dengan demikian informasi keuangan pemerintahan akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi serta akuntabilitas. Internal Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, artinya bahwa aktif/tidaknya internal audit dalam melakukan pengawasan terhadap laporan keuangan tidak ada pengaruhnya terhadap kualitas Laporan Keuangan pada instansi pemerintahan kota Padang. Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Instansi Pemerintah Kota Padang. Kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh Sumber sumber daya manusia. Sehingga hipotesis diterima. Sistem Informasi Akuntansi secara parsial berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan di Instansi Pemerintah Kota Padang. Artinya pemberian system informasi akuntansi yang baik oleh Instansi pemerintah kota Padang akan meningkatkan system informasi akuntansi di pemerintah. Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan di instansi pemerintah kota Padang. Artinya Penggunaan Teknologi Informasi di Instansi Pemerintah sangat diperlukan dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah ke layanan publik. Sistem Pengendalian Internal secara parsial berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Instansi Pemerintah Kota Padang. Jika Pengendalian internal meningkat dengan baik menghasilkan kualitas laporan keuangan berkualitas, begitu juga sebaliknya. Sehingga hipotesis diterima.

UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan terselesaikannya penelitian ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang turut membantu hingga penelitian ini terselesaikan. Dengan kerendahan hati dan rasa terima kasih saya kepada Instansi Pemerintah Kota Padang

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya & Surjono. (2018). Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan. *Sikap*, 2(2), 96–111.
- Eveline, F. (2016). Pengaruh Sap Berbasis Akrua, SIA, Kualitas SDM, Pengendalian Internal Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di BNPD. 1–14.
- Hartono, Arif, dkk. (2019). Pengaruh KSDM, Sistem Pengendalian Intern, Dan Pemanfaatan TI Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di SKPD Kabupaten Ponorogo. 3(2), 108–119.
- Ilat, Ventje, dkk. (2015). Pengaruh KSDM, TI, Reviu Laporan Keuangan Dan SPI Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Prov Sulawesi Utara. (17), 152–167.
- Nadir. (2017). Pengaruh Pemanfaatan TI, KSDM, Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening SAP Berbasis Akrua (Studi Empiris Di Pemda Kabupaten Barru). 14(1), 57. <https://doi.org/10.29264/jakt.v14i1.1007>
- Nunung Suhaeti, Suhendar, D. (2015). Pengaruh Implementasi SAP Dan SPIP Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan. 90–105.
- Priyatno, D. (2014). SPSS 22 Pengolahan Data Terpraktis. Yogyakarta.
- Riawan. (2017). Pengaruh Kualitas SDM dan Kualitas Anggaran Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Yang Dimoderasi Dengan SIMDA Pada SKPD Kabupaten Buton Utara. 8(1), 50–60. <https://doi.org/10.17977/um002v8i12016p050>
- Sofyani & Akbar. (2013). Hubungan Faktor Internal Institusi Dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 10(2), 184–205.
- Sukiati & Pertami. (2017). Analisis KSDM Bagian Akuntansi Dalam Pemahaman Terhadap Laporan Keuangan Pada Bumd Kota Bandung. 5(1), 1369–1376. <https://doi.org/10.17509/jrak.v5i1.6738>
- Taman, A. (2017). Pengaruh KSDM, Penerapan SAP, Dan SAK Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY. *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 6(2). <https://doi.org/10.21831/nominal.v6i2.16643>
- Trisnawati, N. N. (2018). Pengaruh Kualitas SDM dan SPI Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 24, 768–792.
- Wahyuni, S. (2018). Pengaruh KSDM Dan Pemanfaatan TI Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Melalui Pengelolaan Barang Milik Daerah. 12(1), 66–80.
- Zulvia, D. (2015). Analisis Pengendalian Intern Piutang Usaha Pada Koperasi Pembangunan Usaha Sumbar. 2(1), 8–19.